



LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
Tanggal 17 Mei – 15 Agustus 2022
(Masa Sidang Mulai Tanggal 17 Mei – 7 Juli 2022
Dan Masa Reses Mulai Tanggal 8 Juli – 15 Agustus 2022)
Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI
Tanggal 28 Maret 2022

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 adalah sebagai berikut:

I. FUNGSI LEGISLASI

Terkait dengan fungsi Legislasi, pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

1. Rapat Pimpinan dan Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 18 Mei 2022 dengan acara Pembahasan Program Kerja Komisi VI DPR RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022. Dan Komisi VI DPR RI menyetujui untuk, antara lain :

1. Rapat menyetujui pada Masa Persidangan V Tahun 2021-2022, untuk melanjutkan :

- a) pembahasan RUU tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
- b) Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The*

Republic of Korea (pengesahan perjanjian Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea);

- c) Selanjutnya terkait hal tersebut, Komisi VI DPR RI masih menunggu surat penugasan untuk membahas RUU yang dimaksud.

2. Rapat menyetujui pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, akan dijadwalkan :

- a. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, dan Siklus jadwal pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, direncanakan pembahasan RKP dan RKAKL mitra Komisi VI DPR RI tanggal 2 sd 10 Juni 2022. Hasil Pembahasan tersebut disampaikan paling lambat tanggal 10 Juni 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI.
- b. Komisi VI DPR RI akan melakukan pembahasan usulan PMN Tahun Anggaran 2023 dengan Menteri BUMN dan pendalaman dengan BUMN Penerima usulan PMN Tahun Anggaran 2023.

3. Rapat menyetujui pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan Rapat Kerja/RDP/RDPU/Panja sebagai berikut :

- a. Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI, pembahasan mengenai harga minyak goreng dan kebutuhan bahan pokok. Selain itu juga ada pembahasan mengenai RCEP dan IK-CEPA.
- b. Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/ Kepala BKPM dan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN, Pembahasan mengenai RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Investasi Tahun 2021 dan Triwulan I 2022.
- c. Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan RDP dengan Kepala BSN dan Dirut Bulog, Pembahasan mengenai RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2023, Progres penyaluran BPUM, Pembahasan mengenai Satgas penanganan koperasi bermasalah dan Sertifikasi UKM yang bermasalah.

- d. Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Pembahasan mengenai Usulan BUMN penerima PMN TA 2023 dan Usulan tentang rencana IPO/Right Issue
- e. RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut PTPN III, Pembahasan mengenai korporasi dan RKAP TA 2022.
- f. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Holding BUMN Farmasi dan Anggota BUMN Farmasi, pembahasan mengenai Kinerja Korporasi dan Kesiapan serta Progres Vaksinasi *Booster*;
- g. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT KAI, PT ASDP, PT Pelni dan Perum Damri mengenai Evaluasi Pelaksanaan Dukungan BUMN Transportasi Hari Raya Idul Fitri 1443 H.
- h. RDP Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM mengenai Progress Investasi.
- i. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, pembahasan mengenai kinerja korporasi dan RKAP TA 2022 serta penyediaan pupuk nasional;
- j. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia, pembahasan mengenai Kinerja Korporasi dan RKAP TA 2022 serta Industri Semen Nasional;
- k. RDP Komisi VI DPR RI dengan Kepala Bappebti, pembahasan mengenai *Digital Currency dan Robot Trading*.
- l. RDP Komisi VI DPR RI dengan BUMN Penerima PMN 2023 (masih menunggu data dari Kementerian BUMN).
- m. RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut Holding Pertamina dan Dirut Sub Holding Pertamina, pembahasan mengenai Kinerja dan RKAP TA 2022 serta penyesuaian harga minyak.
- n. RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Pembahasan Mengenai Kinerja Korporasi dan RKAP TA 2022
- o. RDP Komisi VI DPR RI dengan Ketua KPPU/ Kepala BSN/Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang, Pembahasan RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2023.

- p. RDP Komisi VI DPR RI dengan BUMN penerima PMN 2023 dengan PT RNI (Persero), Perum Damri, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/ LPPNPI/Airnav Indonesia dan PT LEN Industri (Persero)
- q. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama BUMN penerima PMN 2023 dengan PT Utama Karya (Persero), PT PLN (Persero) dan PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero), pembahasan mengenai Pendalaman terhadap penerima usulan PMN TA 2023, Evaluasi pelaksanaan PMN TA 2022 (HK dan PLN) dan Penjelasan aksi korporasi dan RKAP TA 2022.
- r. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama BUMN penerima PMN 2023 dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT KAI (Persero) dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), pembahasan mengenai Pendalaman terhadap BUMN penerima usulan PMN TA 2023 dan Penjelasan aksi korporasi dan RKAP TA 2022
- s. RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut BUMN penerima PMN 2022 dengan PT Waskita Karya (Persero), Tbk, PT Adhi Karya (Persero), Tbk dan Perum Perumnas. Pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan PMN TA 2022 dan Pembahasan RKAP 2022.
- t. RDP Komisi VI DPR RI dengan PT Jasa Marga dan PT PP (Persero), mengenai Pembahasan Kinerja Korporasi dan RKAP TA 2022
- u. RDP Komisi VI DPR RI dengan BUMN Jasa Infrastruktur, mengenai Pembahasan Kinerja Korporasi dan RKAP TA 2022
- v. RDP Komisi VI DPR RI dengan Deputi SDM Kementerian BUMN dan Ketua Forum Human Capital Indonesia, pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan rekrutment bersama pegawai BUMN
- w. RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut LPDB, pembahasan mengenai Pembahasan mengenai progress penyaluran dana bergulir
- x. RDP Komisi VI DPR RI dengan Himbara, Pembahasan Kinerja Korporasi dan RKAP TA 2022

4. Rapat menyetujui pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan Rapat Panja sebagai berikut :
 - a. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI

Panja BUMN Energi akan melakukan rapat dengan Direktur Utama Subholding Pertamina dan Direktur Utama Anak perusahaan PLN. Semula dipimpin oleh bapak Gde Sumarjaya Linggih, S.E, M.A.P diganti dengan bapak M.Sarmuji, S.E, M.Si.
 - b. Panja Perdagangan Komoditas Ekspor Komisi VI DPR RI

Hasil kesimpulan Rapat Panja Perdagangan Komoditas Ekspor Komisi VI DPR RI pada tanggal 21 Maret 2022 akan merumuskan laporan panja kepada Komisi VI DPR RI, akan dibahas kembali pada masa sidang tahun anggaran 2021-2022 agar lebih terencana, terstruktur dan lebih baik lagi.
 - c. Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI

Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN rapat terkait dengan penutupan BUMN. Direncanakan akan melaksanakan rapat terkait dengan pembubaran BUMN yang sudah tidak beroperasi dan 4 (empat) BUMN yang akan dibubarkan dibawah Danareksa-PPA.
 - d. Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok Komisi VI DPR RI

Panja Pangan Komisi VI DPR RI dengan Kemendag akan menghadirkan evaluasi harga komoditas dengan melakukan rapat dengan Eselon I Kementerian Perdagangan.

5. Rapat menyetujui pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan Kunjungan Spesifik, Kunjungan Kerja Reses dan Kunjungan Kerja Pengawasan Luar Negeri Komisi VI DPR RI sebagai berikut :
 - a. Kunspek ke I (tgl. 21-23 Juni 2022), ke Provinsi:
 - 1) Provinsi Jawa Timur;
 - 2) Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Kunspek ke II (tgl. 29 Juni- 1 Juli 2022), ke Provinsi :
 - 1) Provinsi Jawa Barat;
 - 2) Provinsi Jawa Barat.
 - 3) Provinsi Jawa Barat

- c. Reses Masa Persidangan V DPR RI dimulai tanggal 8 s.d 12 Agustus 2022. Kunjungan Kerja Reses pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, akan dilaksanakan ke 3 (tiga) provinsi:
 1. Provinsi Nusa Tenggara Timur
 2. Provinsi Kalimantan Utara
 3. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- d. Kunjungan Kerja Pengawasan Luar Negeri Komisi VI pada tanggal 20-26 Juni 2022 ke Belanda.

2. Rapat Intern Komisi VI DPR RI tanggal 8 Juni 2022 dengan pembahasan penyesuaian program kerja masa persidangan V tahun siding 2021-2022, kesimpulan antara lain :

1. Membentuk Panja yaitu **Panja Investasi Saham BUMN**;
2. Panja Investasi BUMN ini dipimpin oleh bapak M. Sarmuji, S.E, M.Si; dan
3. Rapat Panja akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

3. Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 4 Juli 2022 dengan acara Pengambilan Keputusan Terhadap Usulan BUMN Penerima Penyertaan Modal Negara Tahun 2023 dan Inisiatif Corporate Action Tahun 2022. Dan Komisi VI DPR RI menyetujui untuk, antara lain :

1. Pandangan Fraksi-Fraksi di Komisi VI DPR RI terhadap Pengambilan Keputusan Usulan BUMN Penerima Penyertaan Modal Negara Tahun 2023; dan Inisiatif Corporate Action 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Pandangan Fraksi	Keterangan
1	Fraksi PDIP	Menyetujui dengan beberapa catatan
2	Fraksi Golkar	Menyetujui dengan catatan tambahan
3	Fraksi Gerindra	Menyetujui dengan catatan tambahan
4	Fraksi Nasdem	Menyetujui dengan catatan tambahan
5	Fraksi PKB	Menyetujui dengan catatan tambahan
6	Fraksi Demokrat	Menyetujui dengan catatan kritis

7	Fraksi PKS	Menyetujui kecuali KCJB agar ditunda dan dijelaskan permasalahannya
8	Fraksi PAN	PMN Tunai, Menyetujui sebagian. PMN Non Tunai, Setuju seluruhnya. Aksi Korporasi, setuju dengan pendalaman lebih lanjut.
9	Fraksi PPP	Setuju dengan catatan.

4. Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 4 Juli 2022 dengan acara Pembahasan RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan Pembahasan RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea. Dan Komisi VI DPR RI menyetujui untuk, antara lain :

1. Pandangan Fraksi-Fraksi di Komisi VI DPR RI terhadap Pengambilan Keputusan Usulan BUMN Penerimaan Penyertaan Modal Negara Tahun 2023; dan *Inisiatif Corporate Action 2022* adalah sebagai berikut :

No.	Pandangan Fraksi	Keterangan	
1	Fraksi PDIP	Menyetujui	
2	Fraksi Golkar	Menyetujui	
3	Fraksi Gerindra	Menyetujui	
4	Fraksi Nasdem	Menyetujui	
5	Fraksi PKB	Menyetujui	
6	Fraksi Demokrat	Menyetujui	
7	Fraksi PKS	Menyetujui dengan catatan	
8	Fraksi PAN	Menyetujui	
9	Fraksi PPP	Menyetujui	

5. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada tanggal 5 Juli 2022 dengan Menteri Perdagangan RI, dengan Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi

Komprehensif antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea. Dan Komisi VI DPR RI menyetujui untuk, antara lain :

1. Setelah mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dan RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Korea).
2. Komisi VI DPR RI dan Pemerintah telah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dan RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Korea), dalam pembahasan tersebut terhadap RUU Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dan RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Korea) dari ketentuan menimbang, mengingat, menetapkan dan DIM terkait dengan Pasal RUU yang terdiri dari 2 Pasal, seluruh Fraksi menyepakati dengan tidak ada perubahan (Tetap).
3. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dan RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan

Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Korea), Komisi VI DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU Tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dan RUU Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Republic of Korea) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi Undang-Undang.

II. FUNGSI ANGGARAN

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Komisi VI DPR RI menjadwalkan pembahasan Anggaran dengan agenda Pendalaman RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2023. Dengan beberapa BUMN antara lain :

1. RDP Komisi VI DPR RI pada tanggal 2 Juni 2022 dengan Pejabat Eselon I Badan Standardisasi Nasional (BSN), dengan agenda Pembahasan RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2023, dengan kesimpulan antara lain:
 1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon 1 Badan Standardisasi Nasional; Plt. Sekretaris Utama BSN, Deputi Bidang Pengembangan Standar, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan BSN terkait alokasi pagu indikatif Badan Standardisasi Nasional Tahun 2023 sebesar Rp198.285.122.000 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang akan dialokasikan untuk:

- a. Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp78.525.530.000 (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
 - b. Belanja Operasional Barang sebesar Rp50.901.064.000 (*Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp45.003.733.000 (*Empat Puluh Lima Miliar Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - d. Kegiatan Teknis-Prioritas Nasional (PN) sebesar Rp15.955.382.000 (*Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - e. Kegiatan lainnya di Program Stannas dan Dukma sebesar Rp 7.899.413.000 (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI dengan Eselon 1 Badan Standardisasi Nasional; Plt. Sekretaris Utama BSN, Deputi Bidang Pengembangan Standar, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan BSN sepakat untuk mengoptimalkan program-program yang akan fokus untuk menjalankan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
 3. Hasil Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Eselon 1 Badan Standardisasi Nasional; Plt. Sekretaris Utama BSN, Deputi Bidang Pengembangan Standar, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan BSN akan disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran Tahun 2023.
2. RDP Komisi VI DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM RI tanggal 2 Juni 2022, dengan agenda Pembahasan RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2023, dengan kesimpulan antara lain:

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I Kementerian Koperasi Dan UKM RI; Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Perkoperasian, Deputi Bidang Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Kecil Dan Menengah, Deputi Bidang Kewirausahaan, Direktur Utama LPDB-KUMKM, serta Direktur Utama LLP-KUMKM terkait postur anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2023 sebesar Rp1.287.517.242.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp398.561.114.000 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
 - b. Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp888.956.128.000 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I Kementerian Koperasi Dan UKM RI; Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Perkoperasian, Deputi Bidang Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Kecil Dan Menengah, Deputi Bidang Kewirausahaan, Direktur Utama LPDB-KUMKM, serta Direktur Utama LLP-KUMKM, terkait dengan usulan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.233.885.556.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).

3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I Kementerian Koperasi Dan UKM RI; Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Perkoperasian, Deputi Bidang Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Kecil Dan Menengah, Deputi Bidang Kewirausahaan, Direktur Utama LPDB-KUMKM, serta Direktur Utama LLP-KUMKM, terkait dengan usulan perubahan alokasi program, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen yang semula sebesar Rp398.561.114.000

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp351.926.830.000 *(Tiga Ratus Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)*.

- b. Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi yang semula sebesar Rp888.956.128.000 *(Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)* menjadi sebesar Rp935.590.412.000 *(Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)*.
4. Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Eselon I Kementerian Koperasi Dan UKM RI; Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Perkoperasian, Deputi Bidang Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Kecil Dan Menengah, Deputi Bidang Kewirausahaan, Direktur Utama LPDB-KUMKM, serta Direktur Utama LLP-KUMKM akan digunakan sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran Tahun 2023.
3. RDP Komisi VI DPR RI dengan Pejabat Eselon I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 2 Juni 2022, dengan agenda Pembahasan RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2023, dengan kesimpulan antara lain:
 1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Sekretaris Jenderal KPPU; Deputi Bidang Penegakan Hukum; Deputi Bidang Kajian dan Advokasi, terkait postur anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2023 sebesar Rp100.814.783.000 *(Seratus Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)* yang dialokasikan dalam:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp13.830.428.000 *(Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)*.

- b. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp15.411.512.000 (*Lima Belas Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
 - c. Belanja Pegawai sebesar Rp45.444.622.000 (*Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - d. Belanja Operasional sebesar Rp26.128.221.000 (*Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- 2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Sekretaris Jenderal KPPU; Deputi Bidang Penegakan Hukum; Deputi Bidang Kajian dan Advokasi, terkait dengan usulan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp129.269.272.000 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - 3. Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Eselon I Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Deputi Bidang Penegakan Hukum; Deputi Bidang Kajian dan Advokasi, akan digunakan sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran Tahun 2023.
 - 4. RDP Komisi VI DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Investasi/BKPM, dengan acara Pembahasan mengenai RKP dan RKA TA 2023 tanggal 3 Juni 2022, dan kesimpulan antara lain :
 - 1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Sekretaris Kementerian Investasi/Sestama BKPM; Deputi Promosi Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM; Deputi Bidang Kerja Sama

Penanaman Modal BKPM; Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM; Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM; Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM; Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi; Plt.Deputi Bidang Hilirisasi; Plt.Deputi Bidang TI, terkait postur anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2023 sebesar Rp646.016.145.000 (*Enam Ratus Empat Puluh Enam Miliar Enam Belas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp314.284.750.000 (*Tiga Ratus Empat Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- b. Program Penanaman Modal sebesar Rp331.731.395.000 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Sekretaris Kementerian Investasi/Sestama BKPM; Deputi Promosi Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM; Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM; Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM; Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM; Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM; Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi; Plt.Deputi Bidang Hilirisasi; Plt.Deputi Bidang TI, terkait dengan usulan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.240.593.724.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).

3. Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Eselon I Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Sekretaris Kementerian Investasi/Sestama BKPM; Deputi Promosi Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM; Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM; Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

BKPM; Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM; Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM; Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi; Plt.Deputi Bidang Hilirisasi; Plt.Deputi Bidang TI, akan digunakan sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran Tahun 2023.

5. RDP Komisi VI DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian BUMN RI dengan agenda rapat yaitu Pembahasan mengenai RKP dan RKA TA 2023 tanggal 3 Juni 2022, dan dengan kesimpulan antara lain :

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I Kementerian BUMN RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/2022 tanggal 18 April 2022, Pagu Indikatif Kementerian BUMN Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp232.004.594.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp162.716.874.000 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar RP69.287.620.000 (Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I Kementrian BUMN RI penjelasan tambahan anggaran 2023 sebesar 79,7 Miliar untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja 2023.
3. Hasil rapat konsinyering Komisi VI DPR RI dengan Eselon I Kementerian BUMN RI menjadi bahan pembahasan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran Tahun 2023.

6. RDP Komisi VI DPR RI dengan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) tanggal 4 Juni 2022, dengan kesimpulan antara lain :

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I BP Batam mengenai capaian tahun 2021 RPJMN BP Batam 2020-2024 dan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2021-2022.
 2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I BP Batam berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, Pagu Indikatif BP Batam tahun 2023 ditetapkan sebesar **Rp1.722.948.329.000,-** (*Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan rincian program Dukungan Manajemen sebesar **Rp858.169.534.000,-** (*Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar **Rp864.778.795.000,-** (*Delapan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I BP Batam mengenai usulan tambahan anggaran 2023 sebesar **Rp386.000.000.000,-** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Rupiah*) dalam bentuk Rupiah Murni untuk dapat mendanai kegiatan Prioritas Nasional di KPBPB Batam.
 4. Hasil rapat dan masukan seluruh anggota Komisi VI DPR RI dalam konsinyering dengan Eselon I BP Batam menjadi bahan pembahasan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.
7. RDP Komisi VI DPR RI dengan Eselon I Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) tanggal 4 Juni 2022, dengan kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS Sabang) mengenai sasaran strategis dan RKP K/L BPKS Sabang TA 2020- 2024.

2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I BPKS Sabang berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, Pagu Indikatif BPKS Sabang tahun 2023 ditetapkan sebesar **Rp66.527.592.000,-** (*Enam puluh enam milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) yang bersumber dari Rupiah Murni Sebesar **Rp63.857.592.000,-** (*Enam puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) dan Badan Layanan Umum BPKS sebesar **Rp2.670.000.000,-** (*Dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*).
 3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Eselon I BPKS Sabang mengenai usulan tambahan anggaran 2023 sebesar **Rp48.774.168.000,-** (*Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dalam bentuk Rupiah Murni untuk dapat mendanai program pengembangan strategis BPKS Sabang Tahun 2023.
 4. Hasil rapat dan masukan seluruh anggota Komisi VI DPR RI dalam konsinyering dengan Eselon I BPKS Sabang menjadi bahan pembahasan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS Sabang dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.
8. RDP Komisi VI DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan RI tanggal 4 Juni 2022, dengan kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan RI mengenai arah kebijakan Rencana Kerja Kementerian Perdagangan RI TA 2023.
 2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan RI berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, Pagu Indikatif Kementerian Perdagangan RI tahun 2023 ditetapkan sebesar **Rp2.140.206.191.000,-** (*Dua Triliun Seratus Empat Puluh Miliar Dua Ratus*

Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terbagi atas Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp1.277.537.745.000,-** (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*); Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar **Rp485.000.991.000,-** (*Empat Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*); dan Program Perdagangan Luar Negeri sebesar **Rp377.667.455.000,-** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan RI mengenai usulan tambahan anggaran 2023 sebesar **Rp212.157.394.000,-** (*Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) ditambahkan **Rp200.000.000.000,-** (*Dua Ratus Milyar Rupiah*) untuk revitalisasi pasar tradisional dan atau bantuan sarana perdagangan dalam bentuk Rupiah Murni untuk dapat mendanai program/kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023.
 4. Hasil rapat dan masukan seluruh anggota Komisi VI DPR RI dalam konsinyering dengan Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan RI menjadi bahan pembahasan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.
9. RDP Komisi VI DPR RI dengan Ketua KPPU/Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang tanggal 6 Juni 2022, dengan acara Pembahasan RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2023, dengan kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI meyetujui pagu indikatif BP Batam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah ditetapkan sebesar **Rp1.722.948.329.000,-** (*Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan rincian

program Dukungan Manajemen sebesar **Rp858.169.534.000,-** (*Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar **Rp864.778.795.000,-** (*Delapan Ratus Enam Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan Kepala BP Batam sebesar **Rp386.000.000.000,-** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Rupiah*) dalam bentuk Rupiah Murni untuk dapat mendanai kegiatan Prioritas Nasional di BP Batam.
3. Komisi VI DPR RI meyetujui pagu indikatif BPKS Sabang Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah ditetapkan sebesar **Rp66.527.592.000,-** (*Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) yang bersumber dari Rupiah Murni Sebesar **Rp63.857.592.000,-** (*Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) dan Badan Layanan Umum BPKS sebesar **Rp2.670.000.000,-** (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan Plt. Kepala BPKS Sabang sebesar **Rp48.774.168.000,-** (*Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dalam bentuk Rupiah Murni untuk dapat mendanai program pengembangan strategis BPKS Sabang Tahun 2023.
5. Komisi VI DPR RI meyetujui pagu indikatif KPPU Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah ditetapkan sebesar **Rp100.814.783.000** (*Seratus Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
 - a. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar **Rp15.411.512.000**

(Lima Belas Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

- b. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp13.830.428.000** *(Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).*
 - c. Belanja Pegawai sebesar **Rp45.444.622.000** *(Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).*
 - d. Belanja Operasional sebesar **Rp26.128.221.000** *(Dua Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).*
6. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 yang diajukan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar **Rp129.269.272.000** *(Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)* untuk dapat mendanai kegiatan Prioritas di KPPU.
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada BP Batam, BPKS Sabang dan KPPU untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
10. Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI tanggal 7 Juni 2022, dengan pembahasan RKP dan RKA TA 2023, Usulan BUMN penerima PMN TA 2023 dan usulan tentang rencana IPO, dengan kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian BUMN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp232.004.494.000 *(Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)* yang terdiri atas:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp162.716.874.000 *(Seratus Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)*

- b. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp69.287.620.000 (*Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran 2023 sebesar Rp79.700.000.000 (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*) untuk dapat mendukung pencapaian target kinerja 2023 yang terdiri atas :
 - a. Peningkatan Kapasitas *Executive Talent Management* sebesar Rp1.400.000.000 (*Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*)
 - b. Renovasi Gedung serta Kebutuhan operasional lainnya sebesar Rp25.000.000.000 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*)
 - c. Pembangunan PLTS sebesar Rp6.000.000.000 (*Enam Miliar Rupiah*)
 - d. Penguatan Sistem Informasi sebesar Rp38.300.000.000 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*)
 - e. Implementasi *Big Data Infrastructure* sebesar Rp3.000.000.000 (*Tiga Miliar Rupiah*)
 - f. Biaya dan lain-lain (Peningkatan Program TJSL, *Benchmark* SDG's Perbaikan tata kelola BUMN, dan *Monitoring* PSN) sebesar Rp6.000.000.000 (*Enam Miliar Rupiah*)
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Tunai tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp10.000.000.000.000 (*Sepuluh Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT (Penugasan).
 - b. PT LEN Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata (Pengembangan Usaha)

- c. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp2.000.000.000.000 (*Dua Triliun Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (Pengembangan Usaha).
- d. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp30.561.000.000.000 (*Tiga Puluh Triliun Lima Ratus Enam Puluh Satu Miliar Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II. Angka PMN Rp.30,56 T ini turun dari permohonan sebelumnya sebesar Rp.36,78 T dikarenakan optimasi pendanaan dari kerjasama *Asset Recycling* jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS Tahap II) (Penugasan).
- e. PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)/In Journey sebesar Rp9.500.000.000.000 (*Sembilan Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan untuk Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika (Penugasan dan Pengembangan Usaha).
- f. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp6.000.000.000.000 (*Enam Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo (Penugasan).
- g. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.100.000.000.000 (*Empat Triliun Seratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB.
- h. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan (Pengembangan Usaha).

- i. Perum DAMRI sebesar Rp867.000.000.000 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan (Penugasan dan Pengembangan Usaha).
 - j. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia sebesar Rp790.000.000.000 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Miliar Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka mencapai *seamless Air Traffic Management* (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem (Penugasan).
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT LEN Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp838.400.000.000 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) yang akan digunakan memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
 - b. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp2.609.070.000.000 (*Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah*) yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
5. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami inisiatif *Corporate Action*, antara lain :
 - a. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* yang akan digunakan

untuk Pembayaran Utang dan Pengembangan Usaha dan Komisi VI mengusulkan Kementerian BUMN untuk mempertimbangkan keterlibatan BUMN lain dalam pelaksanaan aksi korporasi ini.

- b. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan Inbreng Semen Baturaja pada Semen Indonesia melalui skema *Right Issue*.
 - c. PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*).
 - d. PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp1.980.000.000.000 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*).
 - e. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp2.980.000.000.000 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*) dari cadangan pembiayaan investasi.
 - f. PT Semen Kupang akan menjual Saham Pemerintah dengan metode Privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor.
 - g. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp7.500.000.000.000 (*Tujuh Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) dari cadangan pembiayaan investasi, serta pendanaan *new investor* untuk restrukturisasi dan transformasi selama tahun 2022-2023 (*Right Issue Tahap II*).
6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

11. Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI tanggal 7 Juni 2022, dengan pembahasan RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2023, Pembahasan mengenai minyak goreng dan kebutuhan bahan pokok.
12. Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM, RDP Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN tanggal 8 Juni 2022, Pembahasan RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2023, Progres dan rencana penyaluran BPUM, Pembahasan mengenai Satgas penanganan koperasi bermasalah, sertifikasi UMKM bermasalah, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2023 sebesar Rp1.287.517.242.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2023 sebesar Rp1.233.885.556.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI dan untuk selanjutnya akan mendalami Usulan Lanjutan Program BPUM dengan target 12,8 juta penerima berdasarkan 212 Wilayah Kemiskinan Ekstrem, masing-masing penerima mendapatkan Rp600.000 (*Enam Ratus Ribu Rupiah*).
 4. Komisi VI DPR RI mendesak Satgas Koperasi Bermasalah melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk lebih intens dan serius, dalam menangani permasalahan koperasi-koperasi yang bermasalah di lapangan, jika diperlukan dilakukan penindakan tegas.
 5. Komisi VI DPR RI menyetujui agar Usulan Alokasi Pendataan KUMKM sebesar Rp374.662.893.000 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) sebagian direalokasikan untuk peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi.
 6. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Badan Standardisasi Nasional RI

Tahun 2023 sebesar Rp198.285.122.000 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).

7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Badan Standardisasi Nasional RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
-
13. Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM tanggal 10 Juni 2022, dengan acara pembahasan RKP dan RKAKL Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Investasi Tahun 2021 dan Triwulan I 2022, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2023 sebesar Rp646.016.145.000 (*Enam Ratus Empat Puluh Enam Miliar Enam Belas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp314.284.750.000 (*Tiga Ratus Empat Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - b. Program Penanaman Modal sebesar Rp331.731.395.000 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.240.593.724.000 (*Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang akan dialokasikan untuk mendanai program prioritas dalam meningkatkan investasi pada tahun 2023.
 3. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi//Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan rapat:

Pembahasan isu-isu investasi akan dijadwalkan pada pertemuan berikutnya .

14. RDP Komisi VI DPR RI dengan PT RNI (Persero), Perum Damri, Airnav Indonesia dan PT Len Industri (Persero) tanggal 15 Juni 2022, dengan agenda Pendalaman terhadap BUMN penerima usulan PMN TA 2023 dan penjelasan terhadap aksi korporasi serta RKAP TA 2022, dengan kesimpulan antara lain :

1. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (*Dua Triliun Rupiah*) dibutuhkan untuk mendanai kebutuhan investasi dan modal kerja di anggota holding pangan.
2. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara *Non* Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.609.000.000.000,- (*Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Miliar Rupiah*) yang merupakan salah satu program strategis pada kajian pembentukan holding BUMN Pangan.
3. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan dari Direktur Utama Perum Damri dan untuk selanjutnya akan mendalami Usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.866.800.000.000,- (*Delapan Ratus Enam Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*) yang digunakan untuk Program yang memberi peluang peningkatan kinerja dan produktifitas Damri, Meningkatkan kontribusi nilai dividen kepada pemegang saham serta meningkatkan kontribusi layanan transportasi pada masyarakat diseluruh wilayah Indonesia.
4. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan dari Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/Airnav dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.790.245.520.795,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh*

Lima Rupiah) diperuntukkan guna meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan, kapasitas produksi dan relaksasi keuangan perusahaan.

5. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Len Industri (Persero) dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.000.000.000.000,- (*Tiga Triliun Rupiah*) yang digunakan untuk Program Investasi kelompok usaha *Holding Defend ID*.
 6. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Len Industri (Persero) dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara *Non* Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.838.400.000.000,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) untuk memperbaiki struktur permodalan korporasi. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Damri, Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/Airnav dan PT Len Industri (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
15. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Utama Karya (Persero), PLN, Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) tanggal 15 Juni 2022, dengan agenda Pendalaman terhadap BUMN penerima usulan PMN TA 2023, Evaluasi pelaksanaan PMN TA 2022 untuk PT Utama Karya (Persero) dan PLN; dan penjelasan terhadap aksi korporasi serta RKAP TA 2022, dengan kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000.000,- (*Sepuluh Triliun Rupiah*) untuk mendanai pengembangan infrastruktur kelistrikan di seluruh penjuru nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi.
 2. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Utama Karya (Persero) untuk selanjutnya akan mendalami usulan

Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.561.000.000.000,- (*Tiga Puluh Triliun Lima Ratus Enam Puluh Satu Miliar Rupiah*) untuk memperkuat struktur permodalan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

3. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Wakil Direktur Utama PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) untuk selanjutnya akan mendalami Usulan Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.500.000.000.000,- (*Sembilan Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) yang digunakan untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata nasional dan meningkatkan ekonomi masyarakat paska pandemi.
 4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
16. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT KAI (Persero) dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tanggal 16 Juni 2022, dengan agenda Pendalaman terhadap BUMN penerima usulan PMN TA 2023, dan penjelasan terhadap aksi korporasi serta RKAP TA 2022, dengan kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.000.000.000.000,- (*Enam Triliun Rupiah*) untuk penguatan permodalan Askrindo dan Jamkrindo dalam rangka menjaga tingkat *gearing ratio* usaha produktif sesuai ketentuan OJK sampai dengan 2026.
 2. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk selanjutnya akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.100.000.000.000,- (*Empat Triliun Seratus Miliar Rupiah*) untuk menutup *cost overrun* Project Kereta Cepat Jakarta Bandung yang menjadi beban konsorsium Indonesia. Tambahan PMN tersebut dibutuhkan pada tahun 2022

- sehingga akan diusulkan dari APBN 2022 dalam surat terpisah setelah ada keputusan dari Komite Kereta Cepat sebagaimana Perpres No. 93 Tahun 2021.
3. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) untuk selanjutnya akan mendalami Usulan Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.000.000.000.000,- (*Tiga Triliun Rupiah*) untuk perbaikan tingkat kesehatan dan penguatan bisnis perusahaan.
 4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
17. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Perum Perumnas tanggal 16 Juni 2022, dengan Evaluasi pelaksanaan PMN TA 2022, dan pembahasan RKP 2022, dengan kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., progres pelaksanaan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.976.000.000.000,- (*Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Rupiah*) untuk memperkuat ekuitas dalam mendanai Proyek Strategis Nasional dan Non PSN.
 2. Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama Perum Perumnas progres pelaksanaan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.568.000.000.000,- (*Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Rupiah*) untuk memperkuat struktur permodalan dan penyelesaian persediaan Rumah Perum Perumnas.
 3. Komisi VI DPR RI meminta Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., untuk benar-benar mempersiapkan strategi yang tepat terkait rencana *Right Issue* dengan mempertimbangkan faktor target penyerapan dana publik.
 4. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan Perum Perumnas untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling

lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

18. Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN tanggal 4 Juli 2022, dengan acara pengambilan keputusan terhadap usulan BUMN penerima PMN 2023 dan *Inisiatif Corporate Action 2022*.

1. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara Tunai tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp10.000.000.000.000 (*Sepuluh Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT (Penugasan).
- b. PT LEN Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata (Pengembangan Usaha)
- c. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp2.000.000.000.000 (*Dua Triliun Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (Pengembangan Usaha).
- d. PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp30.561.000.000.000 (*Tiga Puluh Triliun Lima Ratus Enam Puluh Satu Miliar Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.
- e. PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero)/In Journey sebesar Rp9.500.000.000.000 (*Sembilan Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan untuk Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika (Penugasan dan Pengembangan Usaha).

- f. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp6.000.000.000.000 (*Enam Triliun Rupiah*) yang akan digunakan untuk Pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo (Penugasan).
- g. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.100.000.000.000 (*Empat Triliun Seratus Miliar Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB.
- h. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan (Pengembangan Usaha).
- i. Perum DAMRI sebesar Rp867.000.000.000 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui *buy the service* dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan (Penugasan dan Pengembangan Usaha).
- j. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia sebesar Rp790.000.000.000 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Miliar Rupiah*) yang akan digunakan dalam rangka mencapai *seamless Air Traffic Management* (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem (Penugasan).

2. Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara Non Tunai tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT LEN Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp838.400.000.000 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.

b. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp2.609.070.000.000 (*Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah*) yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.

3. Komisi VI DPR RI menyetujui inisiatif *Corporate Action*, antara lain :

- a. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* yang akan digunakan untuk Pembayaran Utang dan Pengembangan Usaha dan Komisi VI mengusulkan Kementerian BUMN untuk mempertimbangkan keterlibatan BUMN lain dalam pelaksanaan aksi korporasi ini.
- b. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan Inbreng Semen Baturaja pada Semen Indonesia sebagai implementasi kebijakan Kementerian BUMN dalam melakukan integrasi BUMN Sub Klaster Semen demi penguatan BUMN dalam persaingan industri semen.
- c. PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp3.000.000.000.000 (*Tiga Triliun Rupiah*).
- d. PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp1.980.000.000.000 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*).
- e. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menjual saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sampai dengan Rp2.980.000.000.000 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*) dari cadangan pembiayaan investasi.

- f. PT Semen Kupang akan menjual Saham Pemerintah dengan metode Privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor.
 - g. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam hal tambahan Penyertaan Modal Negara dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2022 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7.500.000.000.000,- (*tujuh triliun lima ratus miliar rupiah*) yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, serta penjualan saham jenis saham dalam portepel dengan metode *right issue* PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dalam rangka tindak lanjut persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp7.500.000.000.000,- (*tujuh triliun lima ratus miliar rupiah*); konversi utang obligasi wajib konversi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (*satu triliun rupiah*) oleh Pemerintah; Penyertaan modal dari pemegang saham lain dan (atau) publik; serta konversi hutang menjadi saham dari nilai *claim settlement* kreditur.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk memperhatikan seluruh catatan/pandangan Fraksi-Fraksi di Komisi VI DPR RI terkait dengan persetujuan PMN Tahun 2023 dan inisiatif *Corporate Action* tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini.
5. Jika dalam proses pengajuan usulan PMN Tahun 2023 dalam RAPBN TA 2023, terdapat perbedaan terkait nilai dana, tujuan penggunaan dan/atau entitas BUMN dengan yang diputuskan di Komisi XI DPR RI dan/atau Badan Anggaran maka Kementerian BUMN RI segera menyampaikan hal-hal tersebut kepada Komisi VI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan kembali atas perbedaan tersebut.

III. FUNGSI PENGAWASAN

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

A. RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT INTERN KOMISI VI DPR RI

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pimpinan DPR RI tanggal 17 Juni 2020 tentang Tata Cara Rapat Komisi/AKD pada masa *New Normal*, rapat-rapat di DPR RI dilaksanakan secara fisik dan virtual. Komisi VI DPR RI telah melaksanakan Rapat Pimpinan dan Intern Komisi VI DPR RI yaitu :

1. Rapat Intern Panja BUMN Energi pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 11.00 – selesai, yaitu membahas Penyusunan Program Kerja Panja dan lain-lain, dengan menghasilkan program-program kerja sbb:
 - a. Rapat Pertama dengan Temanya adalah Ketahanan *Supply* Listrik, Roadmap transisi energi dan Kinerja Korporasi. Mitra yang diundang adalah PT PLN (Persero) dan PT. PJB.
 - b. Rapat Kedua dengan Temanya adalah Ketahanan Energi, Kenaikan Harga BBM Aspek *Safety* Pertamina (Kilang Pertamina). Mitra yang diundang adalah PT Pertamina (Persero), PT Kilang Pertamina Int. (*Subholding Refining dan Petrochemical*), PT Pertamina Hulu Energi (*Subholding Upstream*) dan PT Pertamina Patra Niaga (*Subholding Commercial and Trading*).
 - c. Rapat Ketiga dengan Temanya adalah *Progress Indonesia Battery Corp. (EV Battery)* dan Program hilirisasi minerba (progres proyek smelter). Mitra yang diundang adalah PT Inalum (MIND.ID), PT Antam Tbk dan PT Freeport.
 - d. Rapat Keempat dengan Temanya adalah *Roadmap* Industri Batubara Nasional. Mitra yang diundang adalah PT Bukit Asam.
 - e. Rapat Kelima dengan Temanya adalah Roadmap Industri Gas Nasional (Pengembangan Jargas). Mitra yang diundang adalah PT PGN Tbk.
2. Rapat Intern Panja Komisi VI DPR RI tanggal 8 Juni 2022 dengan pembahasan penyesuaian program kerja masa persidangan V tahun siding 2021-2022, kesimpulan antara lain :

Rapat menyetujui pada Masa Persidangan V Tahun 2021-2022, antara lain :

 1. Membentuk Panja yaitu **Panja Investasi Saham BUMN**;

2. Panja Investasi BUMN ini dipimpin oleh bapak M. Sarmuji, S.E, M.Si; dan
3. Rapat Panja akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

3. Rapat Intern Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital Komisi VI DPR RI tanggal 28 Juni 2022, pembahasan penyesuaian program kerja panja. Kesimpulan antara lain :

Panja Investasi BUMN Pada Perusahaan Digital mengusulkan untuk mengundang RDPU dengan Pakar/Pakar sebagai berikut :

1. Bursa Efek Indonesia
2. Ernst & Young
3. Wisnutama (Komisaris PT. Telkomsel)
4. Perusahaan Sekuritas
5. Edwin Sebayang
6. Irmadi Lubis
7. Kantor Hukum BIG 3 Indonesia yang tidak terafiliasi dengan aksi korporasi tersebut (Hadi Putranto HHP, Makarim Law Firm)
8. Prof. Erman Rajagukguk
9. Kementerian BUMN RI (Pak Tiko, Deputi Bidang Hukum)
10. Staf Khusus Kementerian Keuangan RI.

B. RAPAT KERJA/RDP/RDPU/PANJA KOMISI VI DPR RI

Rapat menyetujui pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022, Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan Rapat Kerja/RDP/RDPU/Panja sebagai berikut :

1. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Holding BUMN Farmasi dan anggota BUMN Farmasi pada tanggal 23 Mei 2022, pembahasan tentang kinerja korporasi dan pembahasan RKAP TA 2022, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Bio Farma (Persero) Holding dan anak Perusahaan terkait perkembangan kinerja perusahaan di Tahun 2021 dan RKAP Tahun Anggaran 2022.

2. Komisi VI DPR RI meminta PT Bio Farma (Persero) Holding dan anak Perusahaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terus berupaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui berbagai *channel* layanan kesehatan khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah dalam kerangka teknologi 4.0.
 - b. Meneruskan pelaksanaan program-program kerja pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus covid-19 dan variannya.
 - c. Melakukan penataan *strategic roadmap* dengan mengedepankan sinergisitas antar anak perusahaan BUMN farmasi dalam rangka memperluas *market share* secara nasional, regional maupun global serta meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan hingga pendapatan negara.
 - d. Memperhatikan kebijakan Pemerintah terkait dengan TKDN dalam industri farmasi.
 - e. Melakukan inovasi teknologi farmasi demi mencapai kemandirian bahan baku industri farmasi nasional.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Bio Farma (Persero) Holding dan anak Perusahaan untuk menyusun rencana strategi *bisnis model* dan peningkatan investasi yang lebih berkesinambungan pada masa Pasca Covid-19 agar menjadi pemain industri farmasi yang kompetitif pada tingkatan nasional, regional maupun global.
4. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI untuk membicarakan solusi yang terbaik bagi sisa vaksin Covid-19, mengingat vaksin BUMN yang akan diluncurkan pada bulan Juli 2022 dan vaksin gotong royong *sinopharm* sejumlah 3,2 juta dosis masih belum disalurkan pada masa akhir pandemi Covid 19 saat ini.
5. Komisi VI DPR RI meminta BUMN Holding Farmasi mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Bio Farma (Persero) Holding dan anak Perusahaan untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan:

Komisi VI DPR meminta penjelasan lebih dalam mengenai kinerja keuangan PT Indofarma Tbk., yang mengalami kerugian berturut-turut sejak tahun 2017.

2. Rapat Panja Perdagangan Komoditas Ekspor tanggal 19 Mei 2022 dengan pembahasan penyusunan program kerja panja, kesimpulan antara lain adalah :
 1. Nomenklatur Panja diubah. Yang semula Panja Perdagangan Komoditas Ekspor menjadi Panja Komoditas
 2. Panja ini bertujuan agar Indonesia dapat memiliki index komoditas nasional dan sistem perdagangan yang efisien dan transparan.
 3. Upaya yang dilakukan adalah dengan menghidupkan Resi Gudang, sehingga kita dapat menghitung seberapa besar pelaksanaan Undang-Undang Resi Gudang telah diterapkan oleh Kementerian Perdagangan.
 4. Dengan adanya index komoditas nasional dan sistem perdagangan yang efisien dan transparan diharapkan dapat mengatasi ketidakpastian informasi supply dan demand komoditas yang tidak jelas saat ini.
 5. Rapat-rapat akan dilakukan dengan mengundang Kementerian Perdagangan, Bappepti, Resi Gudang, Pakar Praktisi/Akademisi seperti Faisal Basri, CSIS, UI dan Asosiasi Komoditas Non Migas.

3. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia Persero, Tbk. Tanggal 24 Mei 2022, pembahasan mengenai kinerja korporasi dan RKAP TA 2022 dan industry semen nasional, dengan kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Semen Indonesia (Persero) Holding dan Anak Perusahaan terkait perkembangan kinerja perusahaan di Tahun 2021 serta meminta Direksi untuk menyampaikan target-target secara kualitatif dan kuantitatif terkait pengembangan PT Semen Indonesia (Persero) Holding dan Anak Perusahaan.

2. Komisi VI DPR RI meminta PT Semen Indonesia (Persero) Holding dan Anak Perusahaan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam capex dan opex.
 3. Komisi VI DPR RI meminta PT Semen Indonesia (Persero) Holding dan Anak Perusahaan untuk menyusun rencana strategi *bisnis model* yang lebih berkesinambungan agar mampu meningkatkan ekspor dan menjadi pemain industri semen nasional, regional maupun global.
 4. Komisi VI DPR RI akan meminta Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk industri semen BUMN.
 5. Komisi VI DPR RI akan meminta Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian untuk memastikan moratorium pembangunan pabrik semen baru.
 6. Komisi VI DPR RI meminta PT Semen Indonesia (Persero) Holding dan Anak Perusahaan untuk memaksimalkan sinergi BUMN sehingga dapat meningkatkan revenue.
 7. Komisi VI DPR RI meminta penjelasan PT Semen Indonesia (Persero) Holding terkait investasi pabrik di Vietnam.
 8. Komisi VI DPR RI meminta PT Semen Indonesia (Persero) Holding dan Anak perusahaan untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
4. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PTPN III tanggal 24 Mei 2022, pembahasan mengenai kinerja korporasi dan RKAP TA 2022, dengan kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PTPN III (Persero) Holding dan Anak Perusahaan terkait kinerja perusahaan pada Tahun 2021 dan perkembangan kinerja perusahaan pada tahun 2022.
 2. Komisi VI DPR RI meminta PTPN III (Persero) Holding dan Anak Perusahaan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

3. Terus berupaya melakukan transparansi perusahaan agar level Keterbukaan Informasi Publik dapat meningkat.
 4. Meneruskan pelaksanaan program-program kerja pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
 5. Terus meningkatkan sinergitas antar anak perusahaan PTP dalam rangka memperluas *market share* secara nasional, regional maupun global serta meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan hingga pendapatan negara.
 6. Memperhatikan hak-hak karyawan perusahaan yang telah pensiun, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Melakukan penataan *strategic roadmap* yang fokus pada industri perkebunan dan produk turunannya.
 8. Komisi VI DPR RI mendukung rencana integrasi bisnis PTPN sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan cara membentuk 3 (tiga) kelompok perusahaan, yaitu: PalmCo, SugarCo, dan SupportingCo, sebagaimana sejalan dengan target Pemerintah, yaitu: (1)Peningkatan produksi minyak goreng dan gula konsumsi untuk kebutuhan pangan nasional; (2)Peningkatan kesejahteraan petani sawit dan tebu melalui peningkatan produktivitas; dan (3)Stabilitas harga dan ketersediaan stok minyak goreng serta gula konsumsi nasional.
 9. Komisi VI DPR RI meminta PTPN III (Persero) Holding dan Anak perusahaan untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
5. RDPU Komisi VI DPR RI dengan Koordinator Tim Kuasa Hukum Member Robot Trading member DNA Pro tanggal 25 Mei 2022, dengan pembahasan menyampaikan aspirasi dari masyarakat yan telah menjadi member terkait dengan member robot trading, dengan kesimpulan antara lain :
1. Terdapat kontradiksi antara BAPPEBTI dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dimana BAPPEBTI menyatakan Robot Trading adalah illegal sementara Kementerian Perdagangan memberikan legalitas berupa penerbitan SIUP L.

2. Belum ada upaya apapun dari BAPPEBTI dan Kementerian Perdagangan untuk mendorong pengembalian dana kepada member robot trading.
3. BAPPEBTI dinilai terlalu lambat dalam menangani permasalahan Robot Trading sehingga kerugian dan korban semakin banyak.
4. Di tengah penyegelan, Kementerian Perdagangan melakukan penerbitan izin baru yaitu SIUP L Berbasis Resiko dimana mekanisme *assessment* belum jelas.
5. Dibutuhkan percepatan regulasi terkait robot trading.

Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum Robot Trading DNA PRO akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Komisi VI DPR RI untuk disampaikan pada saat rapat selanjutnya dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Kementerian/Lembaga terkait.

6. RDP Komisi VI DPR RI dengan Kepala Bappebti tanggal 25 Mei 2022, dengan pembahasan mengenai Digital Currency dan Robot Trading, kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk melakukan penguatan regulasi perdagangan digital seperti aset Kripto serta investasi Robot Trading yang saat ini memiliki kekosongan regulasi, perlindungan investor/pelanggan aset Kripto dalam bursa fisik aset Kripto dan regulasi tentang penasehat berjangka serta bursa aset Kripto. Penyusunan regulasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam 90 hari.
 2. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) bekerjasama dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus- modus baru yang sedang berkembang, penerbitan SIUP L berbasis resiko baik yang sudah ada maupun akan diterbitkan, membangun pusat pengaduan masyarakat baik secara *on-site* maupun *online (call centre)* dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewangan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung (*direct selling*) dalam *market place*.

Penyediaan layanan pengaduan masyarakat oleh BAPPEBTI baik secara *on-site* maupun *online (call centre)* dilakukan selambat-lambatnya dalam 30 hari.

3. Komisi VI DPR RI mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk semakin meningkatkan edukasi dan sosialisasi serta langkah-langkah pencegahan dan potensi penyimpangan dalam praktek perdagangan *Digital* dan investasi *Robot Trading*.
4. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan terkait permasalahan investasi *Robot Trading* serta memberikan kejelasan status dana masyarakat yang mengalami kerugian akibat investasi *Robot Trading* dengan target pelaporan progres dan status tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam 45 hari.
5. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dan teknologi dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan edukasi terkait perdagangan Digital serta investasi melalui *Robot Trading*.
6. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan/Usulan Tambahan (akan disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan) :

1. Komisi VI DPR RI mendukung peningkatan anggaran BAPPEBTI dalam menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi serta langkah-langkah pencegahan dan potensi penyimpangan dalam praktek perdagangan *Digital* dan investasi *Robot Trading*.
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI untuk membekukan sementara BAPPEBTI agar dapat melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja, sistem, regulasi dan Sumber Daya Manusia di BAPPEBTI dalam rangka perbaikan secara menyeluruh dan mendasar

terhadap BAPPEBTI. Selama pembekuan sementara ini, Kementerian Perdagangan bisa mengambil alih atau melaksanakan skenario lain untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan.

7. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan anggota holding tanggal 25 Mei 2022 dengan pembahasan mengenai kinerja korporasi dan RKAP TA 2022. Kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI meminta PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID dan anggota holding untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan eksplorasi dan produksi secara signifikan dengan tetap memperhatikan pengembangan berwawasan lingkungan.
 - b. Menuntaskan dan meningkatkan pelaksanaan proyek Hilirisasi dalam rangka meningkatkan daya saing global.
 - c. Meningkatkan inovasi serta pengembangan teknologi dan digitalisasi di sektor pertambangan dalam rangka meningkatkan efisiensi perusahaan.
 - d. Menyusun strategi dalam rangkaantisipasi dampak ekonomi global terhadap fluktuasi harga barang tambang dan kinerja perusahaan.
 - e. Meningkatkan penyerapan produk dalam negeri dalam rangka pembelanjaan operasi maupun investasi perusahaan.
 2. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah agar PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID dan anggota holding untuk diberikan prioritas dalam memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta tambang potensial lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan kontribusi bagi negara.
 3. Komisi VI DPR RI meminta PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID dan anggota holding bersinergi dengan Kementerian BUMN serta BUMN terkait untuk melaksanakan percepatan pengembangan ekosistem Industri *Electric Vehicle (EV) Battery* nasional.
 4. Komisi VI DPR RI meminta PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID untuk mengutamakan Warga Negara Indonesia dalam pengangkatan jajaran direksi dan komisaris anggota holding.

5. Komisi VI DPR RI mendukung penetapan regulasi atas komoditas timah, nikel dan bauksit sebagai komoditas strategis nasional.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/MIND ID dan anggota holding untuk dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
8. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Holding PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama Subholding PT Pertamina (Persero) tanggal 30 Mei 2022, pembahasan mengenai kinerja korporasi dan RKAP TA 2022 dan penyesuaian harga minyak. Kesimpulan antara lain :
 1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Pertamina (Persero) dan subholding terkait kinerja perusahaan pada Tahun 2021 dan perkembangan kinerja perusahaan pada tahun 2022.
 2. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) dan subholding untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan penataan *strategic roadmap* yang terintegrasi antara sub holding sehingga fokus pada peningkatan daya saing global.
 - b. Meningkatkan inovasi dan pengembangan digitalisasi di segala sektor dalam rangka meningkatkan efisiensi perusahaan dan meminimalisir resiko kebakaran kilang, sehingga target *cost optimization* dapat melebihi capaian pada tahun 2021.
 - c. Meningkatkan upaya pengawasan dan pengamanan serta pencabutan izin usaha penyaluran BBM bersubsidi, agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan di lapangan.
 - d. Meningkatkan kinerja *upstream* demi peningkatan eksplorasi, eksploitasi dan produksi dengan tetap memperhatikan pengembangan berwawasan lingkungan.
 - e. Menuntaskan *roadmap* bisnis dan pelaksanaan proyek energi baru terbarukan dalam rangka mencapai ketahanan energi nasional dan pengurangan emisi.
 - f. Menjaga ketahanan stok BBM dan LPG nasional dalam upaya menghadapi dampak ketidakstabilan harga minyak dunia

- g. Mampu memanfaatkan potensi bisnis energi dan turunannya dalam dinamika politik dan ekonomi global.
 - h. Meningkatkan penyerapan produk dalam negeri dalam rangka pembelanjaan operasi perusahaan dan lebih memperhatikan keterlibatan UMKM serta industri lokal pada acara-acara dan kegiatan yang dilakukan di daerah.
 - i. Agar lebih serius dalam mendorong penggunaan subsidi energi (BBM) yang lebih efektif agar tidak terus menerus menekan APBN dan mengurangi defisit anggaran.
3. Komisi VI DPR RI mendukung usulan Pemerintah untuk melakukan penambahan pagu anggaran TA 2022 subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp267 Triliun dengan memperhitungkan aspek bunga (*interest*) dan ketepatan waktu pencairan dalam rangka menyelamatkan keuangan perusahaan, melindungi daya beli masyarakat, menahan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) dan subholding melampirkan laporan keuangan tahun 2021 Audited dan RKAP Tahun 2022, baik tiap anak perusahaan maupun konsolidasi setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan pada tahun ini.
5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI dan PT Pertamina (Persero) untuk segera duduk bersama menyiapkan aturan teknis turunan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang mengatur mengenai kriteria pihak yang berhak mendapatkan BBM Bersubsidi.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) dan subholding untuk dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
9. Rapat Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI dengan Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) tanggal 13 Juni 2022, pembahasan terkait dengan kepailitan PT Kertas LEces (Persero). Dengan kesimpulan antara lain :

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) terkait Kepailitan PT Kertas Leces (Persero).
 2. Komisi VI DPR RI akan memanggil kurator yang menangani Kapailitan PT Kertas Leces (Persero) tanpa mendapatkan persetujuan Hakim Pengawas.
10. Rapat Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT Telekomunikasi Seluler tanggal 14 Juni 2022, kesimpulan antara lain :
1. Panja Investasi BUMN Pada Perusahaan Digital Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Dirut PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan Dirut PT Telekomunikasi Seluler terkait investasi Telkomsel di GoTo.
 2. Panja Investasi BUMN Pada Perusahaan Digital Komisi VI DPR RI menerima penjelasan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler untuk terus meningkatkan kontribusi kepada Negara dan mendorong percepatan transformasi digital bagi masyarakat Indonesia dengan strategi pembangunan portofolio di tiga area bisnis digital utama, yaitu konektivitas, platform, dan layanan digital.
 3. Panja Investasi BUMN Pada Perusahaan Digital Komisi VI DPR RI menerima penjelasan bahwa seluruh proses investasi Telkomsel di GoTo mengikuti tata kelola perusahaan yang baik diawali proses inisiasi, evaluasi yang melibatkan penasehat finansial dan legal independen, serta persetujuan dari pemegang saham (Telkom dan Singtel) sesuai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.
 4. Panja Investasi Perusahaan Pada Perusahaan Digital Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
11. Rapat Panja Perdagangan Komoditas Ekspor dengan memanggil pakar tanggal 20 Juni 2022, kesimpulan antara lain :

1. Panja Komoditas Komisi VI DPR RI menerima seluruh masukan dari narasumber terkait pengembangan pasar komoditas nasional yang efisien dan transparan baik pasar fisik maupun pasar berjangka yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam Rapat Komisi VI DPR dengan mitra terkait antara lain Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
 2. Panja Komoditas Komisi VI DPR RI menerima seluruh masukan dari narasumber terkait integrasi system informasi harga komoditas yang tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah serta pengembangan aplikasi khusus (Apps) di telepon pintar berbasis Android akan menjadi bahan pertimbangan dalam rapat Komisi VI DPR RI dengan mitra terkait antara lain Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
12. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 27 Juni 2022, kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan pencapaian kinerja PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tahun 2021 serta mendorong PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar target yang ditetapkan untuk tahun 2022 dan periode-periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik.
 2. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. terkait realisasi Penyertaan Modal Negara Tahun 2021 serta mendorong Penyertaan Modal Negara Tahun 2022 yang akan diterima dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai modal kerja penyelesaian proyek jalan tol Kayu Agung – Palembang – Betung dan ruas Bogor-Ciawi-Sukabumi.
 3. Komisi VI DPR RI meminta PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk melakukan perbaikan dan monitoring secara ketat terkait restrukturisasi perusahaan yang dibiayai oleh dana yang bersumber dari *Right Issue* perusahaan termasuk di dalamnya Penyertaan Modal Negara sehingga proses bisnis PT Waskita Karya (Persero) Tbk. beserta anak perusahaan dapat berjalan dengan baik.

4. Komisi VI DPR RI meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk secara aktif melibatkan pengusaha serta UMKM lokal untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan.
 5. Komisi VI DPR RI meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik dan konsisten.
 6. Komisi VI DPR RI meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk menyampaikan laporan pelaksanaan proyek secara detail per proyek termasuk klasifikasi proyek yang merupakan penugasan pemerintah dan bukan penugasan pemerintah dalam rangka mempertajam evaluasi pelaksanaan proyek dan kinerja korporasi.
 7. Komisi VI DPR RI mendorong PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk meningkatkan penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN.
 8. Komisi VI DPR RI meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. untuk dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
9. RDPU Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital Komisi VI DPR RI tanggal 27 Juni 2022, dengan pembahasan kepatutan investasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler di Go To, dengan kesimpulan antara lain :
- Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Pakar dan Akademisi (Dr. Yanuar Rizky, S.E., Ak., MH., Agustinus Edy Kristianto, S.IP., Dr. Piter Abdullah Redjalam dan David Fernando Audy), terkait Kepatutan Investasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi selular di GoTo
10. RDP Komisi VI DPR RI dengan Deputi SDM Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN dan Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia tanggal

28 Juni 2022, pembahasan mengenai Evaluasi pelaksanaan recruitment Bersama pegawai BUMN, dengan kesimpulan :

1. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan dari Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi (SDMTI) Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia (FHCI) terkait pelaksanaan rekrutmen bersama pegawai BUMN di Tahun 2022, serta mendukung Program Rekrutmen Bersama BUMN dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja nasional.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI agar:
 - a. Memastikan independensi, profesionalisme, dan *good corporate governance* dalam proses Rekrutmen Bersama BUMN, secara khusus pada seleksi tahap III BUMN;
 - b. Mendorong FHCI untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam setiap tahapan Rekrutmen Bersama BUMN, termasuk melalui optimalisasi teknologi informasi;
 - c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi talenta-talenta terbaik di seluruh Indonesia untuk bergabung ke BUMN baik sebagai pekerja maupun pimpinan.
 - d. Mendorong kebijakan afirmatif terkait kewilayahan (terkait daerah 3T), gender perempuan dan disabilitas.
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada Deputi SDMTI Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum FHCI untuk melaporkan hasil evaluasi rekrutmen bersama pegawai BUMN tahun 2022.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Deputi SDMTI Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum FHCI untuk memastikan hasil rekrutmen bersama pegawai BUMN tahun 2022 memiliki spirit Pancasila sebagai penggerak budaya korporasi modern.

5. Komisi VI DPR RI meminta Deputi SDMTI Kementerian BUMN RI dan Ketua Umum FHCI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
11. RDP Komisi VI DPR RI dengan Perhutani tanggal 29 Juni 2022, pembahasan kinerja korporasi dan RKAP TA 2022, kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI memahami penjelasan terkait pencapaian kinerja Perum Perhutani tahun 2021 serta mendorong Perum Perhutani untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar target yang ditetapkan untuk tahun 2022 dan periode-periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik.
 2. Komisi VI DPR RI mendorong Perum Perhutani beserta anggota holding untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan inovasi-inovasi usaha termasuk transformasi teknologi dan digital serta pemanfaatan data untuk tujuan yang bersifat prediktif sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas usaha dengan tetap memperhatikan pengembangan berwawasan lingkungan.
 - b. meningkatkan peran dan fungsi dalam mendukung kelestarian hutan nasional termasuk kontribusi pada perekonomian setempat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan UMKM setempat dalam kegiatan usaha perusahaan.
 - c. meningkatkan sinergi dengan BUMN-BUMN di bidang perkebunan dan pangan yaitu PT Perkebunan Nusantara Group dan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food untuk meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan kehutanan nasional serta mewujudkan ketahanan pangan nasional.
 - d. melakukan percepatan integrasi bisnis dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kinerja perusahaan.
 3. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan status dan luas kawasan yang dikelola oleh Perusahaan dalam rangka mencegah pengambilalihan kawasan yang dikelola oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

4. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani untuk menyusun strategi mitigasi resiko terkait implementasi kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dalam rangka meminimalisasi dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja perusahaan.
 5. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani beserta anggota holding untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik dan konsisten serta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh kawasan hutan yang dikelola untuk mencegah terjadinya *illegal logging*, transaksi usaha yang tidak transparan serta tindak kejahatan lainnya yang berdampak negatif bagi kinerja perusahaan.
 6. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani untuk dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
12. RDPU Panja Investasi BUMN Pada Perusahaan Digital tanggal 29 Juni 2022, pembahasan mengenai kepatutan investasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler di Go To, kesimpulan antara lain :
- Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Pakar dan Akademisi (Dr. Edwin Sebayang, SE, MBA, CSA, CIB dan Dr. Dina Deliyana, MBA, CBAP.), terkait Kepatutan Investasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi selular di GoTo.
13. RDP Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia Persero Tbk, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero), PT Krakatau Steel Persero Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Semen Kupang tanggal 30 Juni 2022, dengan pembahasan pendalaman Inisiatif Coporate Action tahun 2022, kesimpulan antara lain :
1. Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari:
 - a. Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., terkait dengan rencana *Right Issue* SIG sebagai implementasi kebijakan Kementerian BUMN dalam melakukan integrasi BUMN Sub klaster Semen demi penguatan BUMN dalam Persaingan industri semen.

- b. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., terkait dengan penjualan saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode privatisasi *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp2.980.000.000.000 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah*) dari cadangan pembiayaan investasi.
 - c. Plh. Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, terkait dengan penjualan saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode *Right Issue* yang akan digunakan untuk pembayaran utang dan pengembangan usaha.
 - d. Plh. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, terkait dengan penjualan saham jenis Saham dalam Portepel dengan metode *Right Issue* sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022, Konversi utang Obligasi Wajib Konversi sebesar Rp1 triliun oleh Pemerintah dan Konversi hutang menjadi saham dari nilai *Claim Settlement* Kreditur.
 - e. Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan Direktur Utama PT Semen Kupang, terkait dengan penjualan Saham Pemerintah dengan metode Privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor.
Dan akan memutuskan persetujuan rencana aksi korporasi perusahaan BUMN dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, untuk melakukan perbaikan dan monitoring secara ketat terkait restrukturisasi perusahaan yang dibiayai oleh dana yang bersumber dari *Right Issue* perusahaan termasuk di dalamnya Penyertaan Modal Negara sehingga proses bisnis beserta anak perusahaan dapat berjalan dengan baik.
 3. Komisi VI DPR RI meminta PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Semen Kupang untuk memperhatikan risiko, mitigasi, tahapan dan *timeline* privatisasi yang akan dilakukan agar dapat mencapai target yang ditetapkan.

4. Komisi VI DPR RI meminta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Semen Kupang untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik dan konsisten serta meningkatkan fungsi pengawasan secara ketat terhadap seluruh aksi korporasi yang berpotensi berdampak negatif bagi kinerja perusahaan.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dan PT Semen Kupang untuk dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu paling lama tanggal 4 Juli 2022, sebelum Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI dimulai.

14. RDPU Komisi VI DPR RI dengan Audiensi dari Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat Member Net 89 (Gempur Net 89) tanggal 5 Juli 2022, dengan kesimpulan :

1. Komisi VI DPR RI menerima aspirasi dari Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat Member Net89 (Gempur Net89) terkait permasalahan investasi *robot trading* yang dihadapi oleh member Net89. Beberapa catatan dan aspirasi yang disampaikan antara lain :
 - a. Kebijakan yang dikeluarkan regulator seharusnya lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
 - b. Terdapat kontradiksi kebijakan antara Bappebti dan Satgas Waspada Investasi (SWI) terkait permasalahan *robot trading* khususnya kebijakan *withdrawal*.
 - c. Perlu dilakukan penyelidikan secara menyeluruh (investigasi digital forensik) dari pihak berwenang untuk mengungkap kondisi permasalahan yang dihadapi oleh member Net 89.
 - d. Perlu ada upaya dari regulator (BAPPEBTI dan Kementerian Perdagangan) untuk mendorong pengembalian dana kepada member Net 89.

- e. Dibutuhkan percepatan regulasi terkait *robot trading* yang memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sebagai pelaku investasi *robot trading*.
 - f. Member Net 89 meminta Komisi VI DPR RI agar dapat memfasilitasi pengembalian dana member Net 89.
2. Seluruh aspirasi yang disampaikan oleh Gerakan Maju Perjuangan Uang Rakyat Member Net 89 (Gempur Net89) akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Komisi VI DPR RI untuk disampaikan pada saat rapat selanjutnya dengan Badan Pegawai Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Perdagangan dan Lembaga terkait.
15. RDP Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Holding), PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Hulu Energi, PT PERTAMINA Patra Niaga tanggal 6 Juli 2022, dengan pembahasan Ketahanan Energi, Kenaikan Harga BBM dan Aspek Safety Pertamina. Dengan kesimpulan antara lain :
1. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI telah mendengar penjelasan PT Pertamina (Persero) untuk menjaga ketahanan energi dengan meningkatkan produksi, pemeliharaan fasilitas, optimasi biaya dan digitalisasi.
 2. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI mendukung langkah PT Pertamina (Persero) dalam melakukan penyaluran produk subsidi agar tidak over kuota dengan menetapkan segmen pengguna BBM subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), Optimalisasi digitalisasi SPBU dengan menggunakan sistem pendaftaran pengguna BBM JBT-JBKP dan LPG subsidi melalui *platform MyPertamina*, Website Pertamina atau pendaftaran langsung di SPBU, pengawasan dan pengamanan bersama instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Instansi/lembaga lainnya, ketersediaan *outlet* produk *non* subsidi dan program *marketing* dan komunikasi.
 3. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI siap mendukung langkah PT Pertamina (Persero) dalam melakukan sosialisasi, edukasi publik dan metode lainnya dalam penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

4. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI mendukung PT Pertamina (Persero) dan PT Kilang Pertamina Internasional terkait kilang untuk menjaga keandalan dan terus meningkatkan menuju *Top Quartile (Q1)* dengan menggunakan 2 (dua) parameter sebagai monitor keandalan kilang yaitu *Plant Availability Factor (PAF)* dan *Operational Availability (OA)*.
5. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI mendukung PT Pertamina (Persero), PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan program peningkatan keahlian, aspek keandalan, peningkatan *maintenance* dengan melakukan pemeriksaan berkala agar keamanannya terjamin dan peningkatan aspek *safety* melalui program *Accelerated Preventive Response (APR)*.
6. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk *mereview* kontrak dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan penunjang bisnis terutama sektor logistik akibat kenaikan harga BBM supaya tidak mengganggu proses produksi di sektor hulu dan distribusi di sektor hilir.
7. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan efektivitas manajemen dengan memperhatikan aturan manajemen SDM perusahaan dan patuh terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan.
8. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) untuk memperjuangkan agar Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dapat juga disalurkan melalui *Pertashop*.
9. Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Pertamina (Persero) selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menjawab pertanyaan anggota Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI secara tertulis.

C. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK/KUNJUNGAN KERJA RESES/KUNJUNGAN KERJA PENGAWASAN LUAR NEGERI KOMISI VI DPR RI

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan kunjungan kerja antara lain :

1. Kunjungan Kerja Pengawasan Luar Negeri ke Belanda pada tanggal 20-27 Juni 2022.
2. Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur terkait Pupuk Indonesia (Tata Kelola Industri Nasional), Provinsi Jawa Tengah terkait PTPN III (Progres Implementasi Holding BUMN Gula pada tanggal 21-23 Juni 2022.
3. Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tanggal 8-12 Agustus 2022.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021 – 2022.

Jakarta, 15 Juli 2022

**KABAGSET KOMISI VI DPR RI,
TTD.**

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si
NIP. 19710407 199203 2 001**